

**LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**Peranan BUMDes Bangkit Prima Dalam Memberikan Pinjaman
Modal Untuk Menunjang UMKM Masyarakat Desa Depok
Bendungan Trenggalek**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Praktik Pengalaman Lapangan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Oleh:

IKA NUR MAHMUDAH

NIM. 12401183268

Dosen Pembimbing Lapangan :

Refki Rusyadi, M.Pd.I.

NIDN. 2027128601

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung ini telah disetujui dan disahkan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Agustus 2021
Di : Tulungagung
Judul Laporan : Peranan BUMDes Bangkit Prima Dalam Memberikan Pinjaman Modal Untuk Menunjang UMKM Masyarakat Desa Depok Bendungan Trenggalek

Menyetujui
Dosen Pembimbing Lapangan



Refki Rusyadi, M.Pd.I.

NIDN. 2027128601

Mengesahkan
a.n Dekan
Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Siswahyudianto, M.M.)

NIDN. 2015068402

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Praktik Pengalaman Lapangan dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyyah menuju jaman yang terang benderang yaitu Agama Islam yang kita nanti nantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Praktik pengalaman lapangan merupakan salah satu bentuk mengimplementasikan secara sistematis dan sinkron antara program Pendidikan di kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di lapangan untuk menjadi tenaga kerja yang professional.

Melalui laporan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
2. Bapak Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung beserta staffnya yang telah memberi kesempatan kepada penyusun mempraktikkan hasil studi di bangku perkuliahan.
3. Bapak M. Aqim Adlan S.Ag., S.Pd., M.E.I., selaku Kepala Jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan kesempatan kesempatan kepada penyusun mempraktikkan hasil studi selama di bangku perkuliahan.
4. Bapak Siswahyudianto, M.M., selaku kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
5. Bapak Dr. Refki Rusyadi, M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Laporan kami yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan.

6. Bapak Edy Sukarsono, S.Pd, M.Pd., selaku Direktur “BUMDes BANGKIT PRIMA” yang telah menyediakan tempat untuk digunakan Praktik Pengalaman Lapangan kepada kami.
7. Kedua orang tua yang selalu memberi motivasi dalam bentuk material maupun spiritual.
8. Nenek dan Kakek yang selalu memberikan motivasi dalam bentuk material maupun spiritual.
9. Seluruh anggota di BUMDes yang telah memberikan kami berbagai pengalaman baru kepada kami selama PPL berlangsung.
10. Serta, teman-teman seperjuangan yang menuntut ilmu di kampus Institut Agama Islam Negeri Tulungagung khususnya Perbankan Syariah.

Penulis meyakini bahwa penulisan laporan ini mempunyai banyak sekali kekurangan dalam hal pembuatan laporan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila dalam pelaksanaan program maupun penyusunan laporan banyak terdapat kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis berharap laporan pertanggung jawaban ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Tulungagung, Agustus 2021



Ika Nur Mahmudah

NIM. 12401183268

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pemikiran.....	6
B.. Tujuan dan Kegunaan	7
C.. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	8
BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK	
A. Profil Lembaga	9
B.. Pelaksanaan Praktik	9
C.. Permasalahan di Lapangan	10
D. Tanggapan Dari Pihak Lembaga Praktik	11
BAB III PEMBAHASAN	
A. Kajian Teori	12
B.. Analisis Temuan Studi.....	16
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	18
B.. Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Perekonomian masyarakat sangat berpengaruh bagi kehidupan setiap orang. Di dalam suatu daerah pasti terdapat pertumbuhan ekonomi penduduk di mana tingkat pertumbuhan ekonomi akan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat terutama di desa. Di setiap desa terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan lembaga penyedia layanan sosial. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah juga masyarakat tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut.¹

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Semenjak berlakunya UU tersebut, BUMDes menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial.

BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa, artinya usaha yang akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa, berkaitan dengan hal tersebut maka BUMDes mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

¹ Riant Nugroho dan Firre An Suprpto, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 3*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), hal. 16.

B. Tujuan dan Kegunaan

1) Tujuan

a. Tujuan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Adapun tujuan dilakukannya Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini yaitu agar mahasiswa dapat mengaplikasikan antara teori yang didapat didalam kampus dengan praktiknya dilapangan. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih melihat keadaan langsung yang terjadi di lapangan. Selain itu mahasiswa juga mampu menganalisis bagaimana peran perbankan terhadap UMKM kecil yang ada di desa, sehingga nantinya mahasiswa dapat berperan aktif dengan harapan hasil yang didapatkan menjadi maksimal.

b. Tujuan dari Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Adapun tujuan dari Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan BUMDes Bangkit Prima dalam memberikan pinjaman modal untuk menunjang UMKM masyarakat desa.

2) Kegunaan diadakannya Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Di BUMDes Bangkit Prima sebagai berikut :

a. Bagi Mahasiswa

1. Dapat mempraktikkan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan, serta mendapatkan ilmu baru selama Praktik Pengalaman Lapangan berlangsung.
2. Melatih cara berkomunikasi dengan anggota BUMDes dan masyarakat sekitarnya.
3. Melatih kecakapan dalam menyelesaikan tugas yang dihadapi apabila terdapat masalah yang terjadi dalam sebuah lembaga.
4. Mengetahui apa saja manfaat BUMDes bagi sebuah desa yang sesungguhnya.

b. Bagi Fakultas

1. Berguna sebagai salah satu media penyerapan informasi yang bermanfaat untuk penyelarasan dengan perkembangan kebutuhan di lapangan.
 2. Sebagai media karena perguruan tinggi memiliki akses yang memadai untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
 3. Sebagai peningkatan standar kurikulum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
 4. Sebagai laporan penilaian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- c. Bagi Lembaga
1. Berguna untuk memberikan semangat, masukan atau evaluasi serta bahan pertimbangan untuk BUMDes “Bangkit Prima”.
 2. Menjalin silaturahmi dan hubungan baik dengan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung khususnya jurusan Perbankan Syariah.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di BUMDes “Bangkit Prima”. Berikut ini waktu dan informasi data Lembaga tempat pelaksanaan PPL:

Nama Lembaga : BUMDes Bangkit Prima
 Alamat : RT 003/RW 001 Desa Depok, Kecamatan Bendungan,
 Kabupaten Trenggalek
 No. Telp/Hp : 085736341383
 Tanggal Pelaksanaa : 12 Juli – 13 Agustus 2021

BAB II

PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga

Penelitian ini dilakukan di BuMDes “Bangkit Prima” Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. Desa Depok merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bendungan. Batas wilayah Desa Depok berbatasan dengan wilayah desa yang lain, yaitu di Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dompok, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumurup, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dawuhan dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pagerwojo.

BUMDes “Bangkit Prima” berdiri sejak tanggal 12 Maret 2008 yang modalnya berasal dari penyertaan modal dari desa. Pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat dikelola secara mandiri yang hasilnya bisa dinikmati kembali oleh masyarakat dengan bentuk usaha Simpan Pinjam. Unit bagian ini modalnya didapat dari beberapa pendiri yang menaruh saham.

Saat ini pengurus dari KSP Wanita “Melati” terdiri dari 8 pengurus.

Dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Komisaris | : Sugeng Asmoro, S.Pd. |
| 2. Direktur | : Drs. Edy Sukarsono |
| 3. Sekretaris | : Putri Yoga Pratama |
| 4. Bendahara | : Tisnawati |
| 5. Kepala unit Usaha Simpan Pinjam | : Nanang Prasetyo |
| 6. Kepala unit Usaha Persewaan / Perantara | : Suwanto |
| 7. Kepala unit Usaha Perdagangan | : Retna Tri Wulandari |
| 8. Kepala Unit Usaha Wisata | : Suprpto, S.Pd. |

B. Pelaksanaan Praktik

Pelaksanaan praktik lapangan ini merupakan salah satu program yang ada di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang bekerjasama dengan instansi atau lembaga sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa(i). PPL tahun 2021

ini berbeda dengan PPL tahun sebelumnya atau PPL gelombang pertama dikarenakan kita dihadapkan dengan wabah virus covid-19 yang mengharuskan untuk menghindari kerumunan, oleh karena itu sistem pelaksanaan PPL gelombang II ini menggunakan sistem virtual/daring (PPL dirumah) dengan sebatas wawancara dan observasi saja. PPL ini dilaksanakan di BUMDes “Bangkit Prima” yang berlokasi di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek.

1. Pada awal pelaksanaan PPL saya diberikan penjelasan oleh Ibu Tisnawati selaku bendahara di BUMDes “Bangkit Prima”. Beliau menjelaskan tentang awal mula berdirinya BUMDes tersebut, menjelaskan fungsi dan manfaat BUMDes untuk masyarakat sekitar. Membuat daftar pertanyaan dan melakukan wawancara dari mulai sejarah berdirinya BUMDes, peranan BUMDes dalam memberikan pinjaman modal kepada masyarakat melalui simpan pinjam desa.
2. Merekap data wawancara ke dalam laporan. Dalam tahap ini semua informasi di masukkan ke dalam laporan.
3. Mencari referensi teori yang sesuai dengan tema yang digunakan untuk menganalisis permasalahan di lapangan.
4. Membuat laporan dengan menginput hasil referensi teori, kemudian menganalisisnya.

C. Permasalahan di Lapangan

Dari pelaksanaan PPL yang sudah dilakukan, penulis menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Bangkit Prima, beberapa permasalahan yaitu: Pertama, penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai karena tidak mudah bagi desa untuk mendapatkan kemampuan manajerial yang unggul dalam pengelolaan usaha. Kedua, pembukuan BUMDes masih dikelola secara manual pada buku dan sederhana karena pengelola belum terlalu mahir mengenai cara pencatatan pembukuan pada komputer. Ketiga, minimnya modal dalam unit usaha simpan pinjam. Keempat, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan BUMDes.

D. Tanggapan Dari Pihak Lembaga

Dari permasalahan yang telah dijelaskan, pengelola BUMDes membenarkan hal tersebut. Oleh karena itu pengelola BUMDes berusaha untuk meningkatkan kualitas SDM. Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM dengan cara meningkatkan pelatihan atau bimbingan teknis yang diadakan oleh pemerintah. Untuk menyampaikan informasi terkait keberadaan BUMDes, BUMDes akan mengadakan sosialisasi tentang peran penting BUMDes di masyarakat sekaligus menyadarkan masyarakat agar masyarakat di Desa Depok menjadi masyarakat yang produktif.

Dengan kendala yang terjadi pada unit simpan pinjam, BUMDes Bangkit Prima telah menetapkan maksimal nominal pinjaman dana dan berusaha mengajak masyarakat agar tetap taat dalam pengembalian dana tersebut, agar nantinya perputaran uangnya menjadi lancar, sehingga masyarakat lainnya yang ingin meminjam dana ke BUMDes Bangkit Prima tidak harus menunggu lama.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.² Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut permendagri No.39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.³ Hal tersebut berarti pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa

Dasar hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diperbarui lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah..⁴ Pengaturan BUMDes diatur dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan

² Maryunani, *Pembangunan Bumdes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hal. 35.

³ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2016), hal. 1.

⁴ Wardhana, dkk, *Kajian Dana Desa: Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur Pada Seribu Desa Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2018), hal. 15.

Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes yaitu Pasal 78-81.⁵

Dasar pembentukan BUMDes adalah UU No.32 tahun 2004 pasal 213 yang berbunyi:

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- b. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah bahkan membuat satu bab khusus mengenai BUMDes yaitu pada BAB X BADAN USAHA MILIK DESA dalam pasal 87 yang berbunyi:⁶

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
2. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royongan.
3. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005, dan diatur lebih rinci melalui Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes.

3. Maksud dan Tujuan BUMDes

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

- a. Menumbuhkembangkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan sumber pendapatan asli desa
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

⁵ Amelia Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, (Jurnal vol. 5, No. 1, 2014), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal. 2.

⁶ Undang-undang Desa 2014 *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, (Bandung : Fokus Media, 2014), hal. 51.

Adapun tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

- 1) Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- 2) Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa
- 3) Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa
- 4) Meningkatkan kreatifitas berwira usaha Desa masyarakat desa yang berpenghasilan.⁷

4. Unit Usaha BUMDes

Usaha yang dapat dijalankan melalui BUMDes antara lain: Pasar desa, Waserda, Transportasi, home industri, perikanan darat, pertanian, simpan pinjam, sumber air, obyek wisata desa, kerajinan rakyat, peternakan, dan argoindustri.

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di perdesaan. Oleh karena itu, di dalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda. Ini sebagaimana ditunjukkan pada contoh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yaitu Unit Perdagangan, Unit Jasa Keuangan, dan Unit Produksi. Unit usaha yang berada didalam BUMDes secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Unit jasa keuangan, misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.
- b. Unit usaha sektor riil/ekonomi, misalnya menjalankan usaha pertokoan, foto copy, sablon, home industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian, dll.

5. Klasifikasi Jenis usaha BUMDes

Ada 5 klasifikasi jenis-jenis usaha yang dilakukan BUMDes diantaranya :

- a. BUMDes Serving

⁷ Purnomo, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Lombok Timur: Makalah BPMPD, 2004), hal. 17.

BUMDes serving melakukan pelayanan pada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan manfaat sosial yang besar, jenis usaha ini mulai tumbuh di beberapa desa.

b. BUMDes Renting

BUMDes renting adalah BUMDes yang menjalankan bisnis penyewaan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.

c. BUMDes Trading

BUMDes trading merupakan BUMDes yang menjalankan usaha dengan berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian.

d. BUMDes Brokering

BUMDes brokering merupakan BUMDes yang menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan masyarakat pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar ataupun BUMDes yang menjual jasa pelayanan kepada masyarakat dan usaha-usaha masyarakat.

e. BUMDes Banking

BUMDes banking adalah BUMDes yang menjalankan bisnis uang, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga yang didapatkan dari rentenir desa atau bank-bank konvensional.⁸

6. Unit Usaha Simpan Pinjam

Usaha simpan pinjam merupakan perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui pemisahan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis.⁹ Jenis usaha ini dianggap lebih mudah dalam mengoperasikan dibandingkan dengan jenis usaha lainnya karena pada dasarnya usaha simpan pinjam ini hanya memberikan pinjaman

⁸ Anom Surya Putra, *BADAN USAHA MILIK DESA: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal.1

⁹ Hendrojogi, *Koperasi : Azas-Azas, Teori & Praktek*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2010), hal. 112.

kepada masyarakat dan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan lagi oleh masyarakat yang meminjam. Prinsip usaha simpan pinjam yang dikelola oleh BUMDes ialah mengutamakan kesejahteraan masyarakat desa. Peran simpan pinjam dalam masyarakat sangat besar, bukan hanya dalam hal pemberi bantuan modal saja, tetapi juga memberikan pembinaan dan bantuan pemasaran produk anggotanya. Simpan pinjam juga merupakan salah satu wadah masyarakat dalam memberdayakan dirinya.

B. Analisis Temuan Studi

BUMDes Bangkit Prima berdiri pada tahun 2008 sampai sekarang dan mempunyai beberapa jenis usaha yang dijalakann, seperti unit simpan pinjam, toko BUMDes Mart untuk keperluan kebutuhan pokok. BUMDes Bangkit Prima merupakan lembaga yang dapat membantu masyarakat di Desa Depok dalam meningkatkan UMKM masyarakat dengan cara memberikan pinjaman modal melalui unit simpan pinjam. Unit saha simpan pinjam ini akan membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha. Kebanyakan usaha yang dimiliki masyarakat Desa Depok yaitu sektor industri rumah tangga dan peternakan. Contoh usaha masyarakat dalam sektor industri rumah tangga yaitu usaha pembuatan keripik pisang, usaha pembuatan keripik singkong, usaha pembuatan alen-alen, dan usaha pembuatan keripik tempe.

Unit usaha simpan pinjam ini sudah beroperasi sejak 2010 dan memiliki jumlah anggaran sebesar Rp 25.000.000,00 yang dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha seperti UMKM. Prosedur dalam melakukan pinjaman, diharuskan bagi calon peminjam untuk membuat proposal yang kemudian diajukan ke BUMDes agar mendapat pinjaman. Usaha ini sudah berjalan cukup lama akan tetapi belum berjalan secara efektif dikarenakan masyarakat yang meminjam dana ada yang memiliki perilaku kurang baik sehingga berdampak pada kelancaran perputaran uang yang dikelola oleh BUMDes.

Pembukuan untuk pencatatan simpan pinjam masih menggunakan buku manual dan belum melakukan pencatatan di komputer karena kurangnya pengetahuan teknologi tentang hal ini. Meskipun pencatatannya masih

sederhana, bendahara BUMDes sudah melakukan pencatatan secara rinci dan pencatatannya mudah dipahami.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan pada BUMDes Bangkit Prima yang beralamat di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek terdapat adanya peran BUMDes dalam memberikan modal untuk mengembangkan usaha seperti UMKM masyarakat desa Depok. Sehingga hal ini akan mengurangi pengangguran dan dapat memperlancar usaha yang dimiliki masyarakat.

Dari hasil observasi, permasalahan mendasar yang dialami oleh BUMDes yaitu kurangnya pengetahuan teknologi dan minimnya modal untuk dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam melakukan usaha UMKM di masa pandemi.

B. Saran

1. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dari pelaksanaan PPL ini diharapkan mampu menjaga hubungan kerjasama serta menambah jaringan relasi dengan lembaga keuangan baik bank maupun non bank serta para pengelola BUMDes. Sehingga memudahkan bagi pelaksanaan PPL gelombang selanjutnya.

2. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan yang baik terutama dalam berperan membantu mengembangkan usaha UMKM masyarakat desa di masapandemi ini.

3. Bagi Mahasiswa Peserta PPL

Bagi para mahasiswa diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam mempraktikkan materi perkuliahan yang diperoleh dan dijadikan pengetahuan serta wawasan ketika memasuki dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Hendrojogi. 2010. *Koperasi : Azas-Azas, Teori & Praktek*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Kusuma Dewi, Amelia. 2014. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. Jurnal Vol. 5 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Nugroho, Riant dan Firre An Suprpto. 2021. *Badan Usaha Milik Desa Bagian 3*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Purnomo. 2004. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Lombok Timur: Makalah BPMPD.

Surya Putra, Anom. 2015. *BADAN USAHA MILIK DESA: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Undang-undang Desa. 2014. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Bandung: Fokus Media.

Wardhana, dkk. 2018. *Kajian Dana Desa: Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur Pada Seribu Desa Di Indonesia*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BERITA ACARA
HARIAN PPL
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN TULUNGAGUNG
GELOMBANG II TAHUN 2021

Pada tanggal 12 Juli sampai dengan 13 Agustus 2021, bertempat di BUMDes BAngkit Prima, telah dilaksanakan PPL Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung gelombang II Tahun 2021 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Ika Nur Mahmudah

NIM : 12401183268

Jurusan : Perbankan Syariah

No.	Hari/Tanggal	Pukul	Kegiatan
1.	Senin, 12-07-2021	10.00	Melakukan survey ke lokasi PPL (BUMDes Bangkit Prima)
2.	Selasa, 13-07-2021	08.30	Pendalaman materi PPL FEBI Gelombang II Tahun 2021 via zoom maupun youtube
3.	Rabu, 14-07-2021	10.00	Membaca dan memahami buku Pedoman PPL Gelombang II Tahun 2021
4.	Kamis, 15-07-2021	19.00	Menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara dengan pimpinan BUMDes
5.	Jumat, 16-07-2021	09.00	Menghubungi Bapak Edy Sukarsono (pimpinan BUMDes) via Whatsapp untuk menanyakan waktu pelaksanaan observasi dan wawancara
6.	Sabtu, 17-07-2021	15.00	Berkunjung ke BUMDes Bangkit Prima untuk melakukan wawancara
7.	Minggu, 18-07-2021	-	Istirahat
8.	Senin, 19-07-2021	15.00	Mereview hasil wawancara

9.	Selasa, 20-07-2021	-	Istirahat
10.	Rabu, 21-07-2021	18.00	Membuat ringkasan hasil wawancara tentang profil BuMDes
11.	Kamis, 22-07-2021	18.00	Mereview kembali pendalaman materi PPL Gelombang II Tahun 2021 melalui youtube
12.	Jumat, 23-07-2021	15.00	Mengetik resume pendalaman materi PPL Gelombang II Tahun 2021
13.	Sabtu, 24-07-2021	18.00	Melanjutkan mengetik resume pendalaman materi PPL Gelombang II Tahun 2021
14.	Minggu, 25-07-2021	-	Istirahat
15.	Senin, 26-07-2021	18.00	Mencari contoh laporan PPL FEBI IAIN Tulungagung untuk dijadikan referensi dalam pembuatan laporan PPL
16.	Selasa, 27-07-2021	-	Istirahat
17.	Rabu, 28-07-2021	-	Istirahat
18.	Kamis, 29-07-2021	18.30	Membaca dan memahami contoh laporan PPL FEBI untuk mengetahui mekanisme penulisan laporan
19.	Jumat, 30-07-2021	18.00	Mulai menulis hasil review wawancara yang dilakukan sebagai dasar membuat profil BUMDes, dan permasalahan di lapangan
20.	Sabtu, 31-07-2021	-	Istirahat
21.	Minggu, 01-08-2021	-	Istirahat
22.	Senin, 02-08-2021	18.30	Mulai menyusun laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
23.	Selasa, 03-08-2021	18.00	Mengetik laporan PPL bagian dasar pemikiran, tujuan dan kegunaan serta tempat dan pelaksanaan (BAB 1)
24.	Rabu, 04-08-2021	18.00	Melanjutkan mengetik laporan PPL bagian BAB 2
25.	Kamis, 05-08-2021	18.30	Menentukan tema essay dan berkonsultasi dengan DPL mengenai judul yang akan diajukan
26.	Jumat, 06-08-2021	18.00	Mulai mengetik tugas essay dengan tema pengalaman PPL

27.	Sabtu, 07-08-2021	20.00	Melanjutkan menetik tugas essay
28.	Minggu, 08-08-2021	-	Istirahat
29.	Senin, 09-08-2021	18.00	Memberikan konfirmasi kepada Ibu Tisnawati apabila hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 akan melakukan observasi dan wawancara tahap kedua melalui via Whatsapp
30.	Selasa, 10-08-2021	10.00	Melakukan wawancara tahap kedua serta mengambil dokumentasi
31.	Rabu, 11-08-2021	18.00	Melanjutkan pembuatan laporan PPL
32.	Kamis, 12-08-2021	18.30	Mulai mengedit dokumentasi
33.	Jumat, 13-08-2021	13.00	Menyelesaikan laporan PPL

Trenggalek, 13 Agustus 2021



Ika Nur Mahmudah
NIM. 12401183268

BERITA ACARA KONSULTASI

Nama : Ika Nur Mahmudah
NIM : 12401183268
Jurusan : Perbankan Syariah
DPL : Refki Rusyadi, M.Pd.I.
Tempat PPL : BUMDes Bangkit Prima
Judul Laporan : Peranan BUMDes Bangkit Prima Dalam Memberikan Pinjaman
Modal Untuk Menunjang Umkm Masyarakat Desa Depok
Bendungan Trenggalek

No.	Hal yang Dikonsultasikan	Catatan DPL	Paraf
1.	Mengkonsultasikan judul laporan PPL		
2.	Kosultasi mengenai keseluruhan isi laporan PPL		
3.			

Tulungagung, 13 Agustus 2021



Refki Rusyadi, M.Pd.I

NIDN. 20271286601

DOKUMENTASI PPL



Resume Pendalaman Materi PPL Gelombang 2 Tahun 2021 FEBI IAIN Tulungagung

Pemateri I: Anang Mustofa, S.E. (Kepala Desa Kendalbulur, Boyolangu, Tulungagung)

Menurut Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 menyatakan bahwa suatu desa memiliki empat aspek penting yaitu pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Selain itu, desa juga memiliki hak dan wewenang. Dimana hak tersebut merupakan hak warisan yang masih hidup prakarsa masyarakat atau desa yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat diantaranya adalah sistem organisasi, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakatnya. Sedangkan kewenangan desa adalah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Di dalam suatu desa juga harus memiliki hakekat dan tujuan pembangunan desa, yang mana dalam pembangunannya itu harus berjalan secara linier dengan pemerintahan pusat. Hal tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, meningkatkan pelayanan publik di desa, penanggulangan kemiskinan serta menjadikan desa sebagai subjek pembangunan. Pembangunan suatu desa terpadu tersebut dilakukan untuk dapat mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa seperti pengembangan desa wisata, desa digital, pengembangan BUMDes serta produk unggulan desa lainnya.

Salah satu desa yang memiliki potensi untuk dapat berkembang di berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu Desa Kendalbulur. Desa Kendalbulur merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Dengan luas wilayahnya sebesar $\pm 244,5$ Ha, dimana sebesar 221 Ha merupakan lahan pertanian dan sisanya yaitu sebesar 23 Ha merupakan perumahan warga setempat. Batas wilayah Desa Kendalbulur yaitu di sebelah barat berbatasan dengan Desa Gesikan, sebelah timurnya adalah Desa Boyolangu, sebelah utara merupakan Desa Bono dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngranti. Desa Kendalbulur itu sendiri terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Kendalbulur, Dusun Genting dan Dusun Rongganan.

Dengan jumlah keseluruhan penduduknya sekitar 3749 jiwa, dimana laki-laki berjumlah 1883 jiwa dan perempuan berjumlah 1866 jiwa.

Pada perkembangannya untuk menjadi suatu desa terpadu, Desa Kendalbulur lebih berfokus pada pengelolaan dan pengembangan BUMDes sebagai lembaga yang mengelola produktivitas usaha masyarakat serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Namun, dalam pelaksanaannya BUMDes tersebut bukan menjadi suatu tempat yang dapat digunakan untuk melakukan simpan pinjam uang atau melakukan transaksi jual beli pada umumnya, melainkan digunakan sebagai perantara untuk membangun suatu desa wisata. Dimana wahana wisata tersebut dikenal oleh penduduk Desa Kendalbulur bahkan masyarakat Tulungagung dengan nama “Nangkula Park”. Nangkula Park sendiri berdiri atas usulan dari Kepala Desa Kendalbulur yang pada saat itu masih dalam tahap menjadi kandidat calon kepala desa. Beliau membuat suatu program yaitu pembangunan lapangan wisata yang juga dapat digunakan sebagai sarana rekreasi warga setempat. Selain itu, program kerja yang dirancang beliau tersebut bertujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan pada BUMDes Kendalbulur.

Selain membangun desa wisata, Desa Kendalbulur juga berupaya untuk berkembang menjadi desa digital. Hal ini dilakukan untuk mempermudah warga setempat dalam memperoleh pelayanan di masa pandemi Covid-19 ini. Dan dengan adanya digitalisasi desa tersebut maka akan mempermudah untuk memberikan transparansi publik tentang keadaan desa dan mempercepat dan efisiensi pelayanan. Pelaksanaan digitalisasi di Desa Kendalbulur terjadi sebab desa tersebut memiliki beberapa potensi diantaranya adalah sumber daya manusia yang telah melek teknologi, letak desa yang strategis, hampir semua warganya berlangganan jaringan internet dan telah memiliki gadget serta di beberapa tempat pun telah *free wifi*.

Aplikasi yang telah diluncurkan oleh Desa Kendalbulur adalah SimpelDesa, dimana aplikasi tersebut bersifat publikasi, administrasi dan tata kelola sosial dan ekonomi warga desa setempat. Kemudian pada tahun 2021 ini, Desa Kendalbulur juga membuat program “Sadewa” yaitu santunan dari desa untuk warga Kendalbulur. Dimana program Sadewa tersebut dibiayai dari hasil yang diperoleh dari Nangkula Park. Program Sadewa tersebut dilakukan untuk mensubsidi dalam bidang pertanian, pendidikan, kesehatan serta subsidi PBB (Pajak Bumi Bangunan). Oleh karena itu,

penting untuk mengenali potensi suatu desa agar dapat melakukan pengembangan dan pembangunan desa yang maju dan terpadu.

Pemateri II: Haris Susianto, S.H., M.Si. (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar)

DISNAKER Kabupaten Blitar memiliki beberapa fungsi dan tugas pokok. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Blitar No. 56 Tahun 2016. Dimana tugas pokok mereka adalah untuk membantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang diberikan kepada kabupaten di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Sedangkan untuk fungsi DISNAKER sendiri yaitu:

- a. Merumuskan kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas
- e. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati

Ketenagakerjaan itu merupakan suatu yang penting untuk suatu negara. Tenaga kerja itu terbagi menjadi tenaga kerja dalam negeri dan tenaga kerja luar negeri. Dalam hal ini diterbitkan regulasi tentang para pekerja migran Indonesia yaitu diatur dalam UU No.18 Tahun 2017. Untuk indikator ketenagakerjaan yang digunakan oleh Kabupaten Blitar yaitu penduduk usia lebih dari 15 tahun, angkatan kerja, bekerja, dan pengangguran. Dalam penanggulangan pengangguran di daerah Kabupaten Blitar, Dinas Tenaga Kerja membuat beberapa pelatihan kewirausahaan dan kompetensi.

Namun, dalam penuntasan pengangguran tersebut masih terdapat isu-isu strategis ketenagakerjaan diantaranya adalah kualitas kompetensi tenaga kerja perlu ditingkatkan, kualifikasi tenaga kerja masih banyak yang belum diterima pasar kerja, ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal, penerapan dan penegakan hukum dan norma ketenagakerjaan belum optimal serta konflik ketenagakerjaan antara pengusaha dengan pekerja.

DISNAKER Kabupaten Blitar juga memiliki beberapa jenis pelayanan publik di dalam bidang ketenagakerjaan. Pelayanan-pelayanan publik tersebut diantaranya adalah:

1. Rekomendasi izin pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
2. Pencatatan serikat pekerja
3. Pengesahan peraturan perusahaan
4. Pendaftaran perjanjian kerja bersama
5. Penyelesaian perselisian hubungan melalui mediator
6. Pelayanan perijinan kerja waktu tertentu
7. Pencatatan lembaga kerja sama
8. Pelaporan jenis pekerjaan penunjang dalam pemborongan pekerjaan
9. Pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan
10. Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja dan lain sebagainya.

Pelatihan kewirausahaan dengan mengembangkan potensi dan keterampilan yang ada pada setiap tenaga kerja. Hal ini dilakukan untuk dapat membuka suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang memiliki keterampilan. Dalam pelatihan kewirausahaan ini DISNAKER akan memberikan beberapa bantuan diantaranya adalah:

- a. Pelatihan usaha yaitu bantuan pelatihan yang sesuai dengan potensi setiap tenaga kerja
- b. Sarana atau modal adalah bantuan sarana atau modal untuk menunjang usaha yang akan dimulai
- c. Pendampingan yaitu pemberian pendampingan usaha oleh beberapa pendamping yang kompeten
- d. Pemasaran adalah bantuan penyaluran produk-produk lokal yang unggul ke pasar yang lebih luas.

Pelatihan lainnya yang menjadi program DISNAKER Kabupaten Blitar adalah pelatihan yang berbasis pada kompetensi. Dalam hal ini meliputi bagaimana bersikap, berketrampilan dan pengetahuan mereka akan pekerjaan yang diminati. Selain mengurus urusan ketenagakerjaan, DISNAKER Kabupaten Blitar juga mengurus tentang transmigrasi. Transmigrasi dilakukan untuk melakukan penyebaran penduduk dan penyebaran pembangunan agar merata. Untuk mengikuti program transmigrasi

tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan seperti pendaftaran dan seleksi, pelatihan calon transmigrasi, fasilitas penempatan dan pelaksanaan penempatan.

Namun, pada saat era pandemi Covid-19 seperti ini juga memberikan dampak bagi pelaksanaan kegiatan tenaga kerja dan pelaksanaan program transmigrasi yang ada. Dampak tersebut antara lain adalah :

1. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri dihentikan
2. Penempatan tenaga kerja dalam negeri melalui kegiatan bursa kerja tidak dapat diselenggarakan
3. Perusahaan merumahkan karyawannya
4. Penempatan transmigrasi ke 3 lokasi ditunda.

Kegiatan yang dilakukan oleh DISNAKER di masa pandemi ini adalah tetap melakukan pendataan pekerja migran yang baru datang dari luar negeri untuk mengantisipasi terjadinya penularan Covid-19. Selain itu, DISNAKER juga melakukan koordinasi pengawasan bersama Dinas Kesehatan dan Pemerintah Desa setempat. Berkaitan dengan para karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan maka Dinas Tenaga Kerja melakukan pendataan agar mereka mendapatkan bantuan sosial serta memberikan fasilitas dan pemberitahuan informasi tentang program kartu prakerja.

Untukantisipasi kedepan yang dapat dilakukan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar adalah dengan penguatan koordinasi dalam rangka pengawasan kepulangan PMI (Pekerja Migran Indonesia) dari luar negeri, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi intensitas kontak langsung serta memonitoring dan melakukan pembinaan kepada perusahaan, PPTKIS, LPKS, TKA di Kabupaten Blitar.

LAMPIRAN BUKTI KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN PENDALAMAN MATERI PPL GELOMBANG II TAHUN PERIODE 202-2021

